

PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA USAHATANI PADI DI SULAWESI TENGGARA

AMIRUDDIN SYAM, DEWI SAHARA DAN DAHYA
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara, Kendari

ABSTRACT

Rice is an agricultural commodity that has strategic value economic, environmental live, social and political aspect. Several governments, policies imply on production process immediately or not especially food crop. The research was done to know the impact of increasing price of fuel oil gas on farming system performance in Southeast Sulawesi Province. The data were collected in Konawe and Kolaka as centre of rice production in Southeast Sulawesi. The result showed that there was in impact on agriculture tools especially tractor rent service, water pump, power thresher and RMU. As the effect on increasing price of fuel oil gas, tractor rent price increased to Rp 600.000 (50 %). Operational cost was fully been responsible for farmer, so the profit was better. The use of water pumps still low. Payment system for service of water pump is sharing holder system, 15 % for pump service and 85 % for farmer. There was no change on sharing composition; the profit obtained by farmer was more increase in relevant with increasing of price of agriculture commodity. The thresher service has change from 6.7 % to 9, 1 % and also service of RMU, 1 kg of 11 kg of rice was given to service hulling. Therefore, the effect of increasing fuel oil gas was burdened to farmer directly or indirectly, so the farmer position was still weak.

Key word: Government Policy, Oil Fuel Gas Price, Farming System Performance, *Rice*

ABSTRAK

Padi merupakan komoditas pertanian yang memiliki arti strategis baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap proses produksi terutama tanaman pangan, dari kebijakan pencabutan subsidi pupuk hingga kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja usahatani padi di Sulawesi Tenggara. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka sebagai sentra produksi padi di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap alsintan terutama jasa sewa traktor, pompa air, power thresher dan penggilingan padi (RMU). Sebagai akibat kenaikan harga BBM usaha jasa traktor mengalami kenaikan sewa sebesar 50 % dari Rp 400.000/ha menjadi Rp 600.000/ha. Fakta di lapangan menunjukkan penambahan biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh petani sehingga keuntungan usaha jasa traktor semakin membaik. Penggunaan pompa air relatif sangat sedikit. Sistem pembayaran untuk jasa pompa air adalah dengan sistem bagi hasil dari hasil kotor, yaitu 15 % untuk jasa pompa dan 85 % untuk petani. Dengan tidak adanya perubahan dalam komposisi pembagian maka keuntungan yang diperoleh pemilik pompa semakin meningkat dengan meningkatnya harga komoditas pertanian. Penggunaan thresher untuk merontok padi juga mengalami perubahan ongkos sewa, yaitu dari 6,7 % (dari 15 karung, 14 karung untuk pemilik dan 1 karung untuk jasa thresher) menjadi 9,1 % (dari 12 karung, 11 karung untuk pemilik dan 1 karung untuk jasa thresher). Demikian pula dengan ongkos jasa RMU. Ongkos pembayaran giling dalam bentuk natura, yaitu dari 11 kg beras yang dihasilkan dipotong 1 kg untuk jasa penggilingan (90,0 % untuk pemilik beras dan 9,1 % untuk jasa RMU) menjadi 90 % untuk pemilik beras dan 10 % jasa RMU. Mencermati secara mendalam hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM sepenuhnya dibebankan kepada petani baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga posisi petani baik sebagai pengguna input maupun sebagai produsen padi cukup lemah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Harga BBM, Kinerja Usahatani, Padi

PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat masih menjadi prioritas utama di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Komoditas padi telah menjadi perhatian pemerintah, khususnya menyangkut kebijakan perdagangan internasional, distribusi, pemasaran dan harga domestik agar beras tetap tersedia sepanjang tahun dengan harga yang cukup terjangkau. Oleh karena itu dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis serta urgensinya, perumusan kebijakan dinilai sangat penting mengingat peranan strategis komoditas padi dalam ekonomi rumah tangga petani, perekonomian nasional dan kepentingan konsumen.

Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan proses produksi dimulai dari dicabutnya subsidi pupuk pada akhir tahun 1998 yang dampaknya dirasakan oleh petani dengan meningkatnya biaya produksi dan terjadinya kelangkaan pupuk terutama untuk tanaman pangan. Walau kebijakan tersebut diiringi dengan menaikkan harga dasar gabah (HDG) namun kenyataan di lapangan harga gabah yang diterima petani masih di bawah HDG tersebut.

Kebijakan pemerintah pada tahun 2005 dengan mengurangi subsidi BBM menyebabkan kenaikan harga BBM hampir 100 persen telah berdampak pada kinerja semua sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian. Di tingkat petani, dampak kenaikan harga BBM ada yang bersifat langsung seperti meningkatnya biaya operasional karena BBM tersebut langsung sebagai salah satu input produksi seperti usaha traktor, pompa air, power thresher, penggilingan padi, atau bersifat tidak langsung lewat kenaikan biaya transportasi seperti pupuk dan pestisida, serta ada yang bersifat penyesuaian dengan berubahnya ongkos atau harga seperti upah tanam dan upah panen yang disesuaikan dengan perubahan ongkos traktor dan harga barang-barang. Hal ini didukung oleh pendapat Dermoredjo (2003) menyatakan bahwa pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor pertanian terlihat dari keterkaitan sektor hulu atau pertanian primer dengan sektor hilir atau agroindustri dimana komoditas padi sangat terkait dengan sektor industri penggilingan padi.

Di sisi lain, sebagai antisipasi dampak dari kebijakan penghapusan subsidi BBM, pemerintah kembali menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang dihasilkan petani sebagai upaya merangsang petani untuk berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan petani padi. Hasil kajian Simatupang, *et al.*, (2005) sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM cukup berhasil, terbukti tidak menyebabkan perubahan berarti pada profitabilitas usahatani padi. Dengan kata lain, HPP baru cukup memadai untuk mengkompensasi kenaikan harga, sewa dan upah sarana maupun prasarana padi akibat kenaikan harga BBM. Menurut

Rachman *et al.*, (2001) substansi dari kebijakan harga dimaksudkan untuk menjamin nilai tukar produk pangan yang wajar terhadap produk lain, meminimalkan tingkat fluktuasi harga antar musim sebagai upaya mewujudkan stabilitas harga pangan, mengendalikan tingkat harga pada garis trend yang sesuai dengan sasaran inflasi dan perkembangan harga dunia, serta mendorong bekerjanya mekanisme pasar secara efisien dan efektif.

Berpijak dari informasi dan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan melihat pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kinerja usahatani padi yang difokuskan pada usaha jasa sewa alsintan seperti traktor, pompa air, power tresher dan penggilingan padi serta melihat tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM periode Oktober 2005.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2005 selama dua musim tanam di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka sebagai sentra dan wilayah potensial pengembangan padi di Sulawesi Tenggara. Dengan pertimbangan yang sama, dari masing-masing kabupaten dipilih dua desa untuk melihat keragaman kinerja usahatani padi, terpilih Desa Langgomea dan Duriyasi di Kabupaten Konawe, Desa Mowewe dan Tahoia di Kabupaten Kolaka.

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan mewawancarai beberapa petani pemilik dan penggarap lahan, pemilik traktor, pemilik pompa air dan power tresher serta wawancara terhadap pemilik penggilingan (RMU). Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Pembahasan dalam kajian ini lebih difokuskan pada usaha jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) meliputi usaha jasa sewa traktor, power tresher dan penggilingan padi, serta tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM periode Oktober 2005.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Traktor

Seiring dengan perubahan lingkungan biofisik dan sosial budaya masyarakat serta didukung oleh berkembangnya industri alat dan mesin pertanian (alsintan) telah menyebabkan terjadi perubahan secara signifikan dalam penggunaan alsintan di tingkat petani. Perubahan tersebut bisa mengarah kepada perubahan jenis alsintan yang digunakan maupun dalam perubahan jumlah. Traktor merupakan salah satu jenis alsintan yang penggunaannya telah berkembang pesat, termasuk juga di Sulawesi Tenggara.

Kepemilikan traktor secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) usaha jasa sewa, (2) petani/kelompok tani, dan (3) pemerintah, pada umumnya dinas dinas lingkup Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan (Friyatno *et al.*, 2004). Hasil inventarisasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa sebagian besar kepemilikan traktor di provinsi ini merupakan milik petani (tuan tanah) dan hanya sebagian kecil merupakan milik usaha jasa sewa traktor. Sehingga pasar usaha penyewaan traktor di wilayah ini relatif kurang berjalan. Kemampuan kerja traktor sangat ditentukan oleh spesifikasi teknis tenaga mesin traktor itu sendiri. Traktor dengan PK lebih tinggi tentunya mempunyai kemampuan kerja lebih tinggi dibanding traktor dengan PK lebih rendah. Dengan perawatan cukup baik, umur ekonomis traktor diperkirakan bisa mencapai 10 tahun. Dalam sehari (7 - 10 jam) kemampuan mengolah lahan sampai siap tanam berkisar 0,25 – 0,35 hektar. Untuk kelompok traktor yang disewakan, jumlah hari efektif mengolah lahan dalam satu musim kurang lebih 20 hari, sehingga dalam setahun (2 musim padi) luas lahan yang bisa terolah sekitar 10 – 14 hektar.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM termasuk jenis solar seiring dengan melonjaknya harga BBM di pasar dunia dan untuk mengurangi beban anggaran negara yang semakin menipis, telah berdampak terhadap kinerja usaha jasa traktor di Sulawesi Tenggara. Untuk menghindari kerugian, kenaikan harga BBM telah direspon dengan adanya penyesuaian besarnya sewa traktor. Sebelum kenaikan harga BBM, besarnya sewa traktor yang umumnya berlaku di Sulawesi Tenggara adalah Rp 400.000/ha dan setelah adanya kenaikan harga BBM menjadi Rp 600.000/ha (meningkat sebesar 50 persen). Secara keseluruhan biaya operasional yang harus dikeluarkan usaha jasa ini mengalami peningkatan sekitar 24,82 persen (Rp 42.027/ha). Kalau diperinci lebih lanjut, biaya BBM jenis solar dan oli yang dikeluarkan usaha jasa ini meningkat masing-masing 27,27 persen dan 22,22 persen, sementara biaya operator meningkat secara proporsional dengan kenaikan sewa traktor, mengingat besarnya ongkos operator 20 persen dari nilai sewa traktor.

Sebelum kenaikan harga BBM, rata-rata keuntungan usaha jasa traktor sekitar Rp 130 ribu/ha pada tingkat RCR 1,48, sedangkan setelah kenaikan harga BBM menjadi Rp 268 ribu/ha pada tingkat RCR 1,81 (Tabel 1). Terlihat bahwa setelah kenaikan harga BBM keuntungan yang diterima usaha sewa traktor ini justru lebih baik dari sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tambahan biaya operasional akibat adanya kenaikan harga BBM sepenuhnya ditanggung petani. Fakta ini juga menunjukkan bahwa usaha jasa traktor cenderung terlalu tinggi menaikkan sewa traktor, karena pada sewa yang baru keuntungannya semakin membaik secara nominal, juga terjadi kenaikan relatif (%) lebih tinggi dari kenaikan biaya operasional. Tanpa adanya perbaikan harga jual gabah di tingkat petani, maka dapat dipastikan insentif yang diterima petani akan menurun.

Tabel 1. Perubahan Profitabilitas per Hektar Usaha Jasa Traktor di Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM 2005.

Uraian	Satuan	Sebelum Kenaikan BBM				Setelah Kenaikan BBM			
		Vol.	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Vol.	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis									
Harga Beli				11 juta				11 juta	
Tenaga Mesin	PK			8,5				8,5	
Umur Ekonomis	Tahun			10				10	
Kemampuan Kerja									
- Jam Operasi	Jam/hari			10				10	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			0,33				0,33	
2. Biaya Operasional				169.345	100,00			231.373	100,00
Solar	Liter	21	1.815	38.115	22,51	21	2.310	48.510	22,95
Oli	Liter	0,12	9.900	1.188	0,70	0,12	12.100	1.452	0,69
Perawatan	Rp			21.818	12,88			26.182	12,39
Upah Operator	Rp	20%		80.000	47,24	20%		120.000	47,31
20% Biaya Bunga	Rp			28.224	16,67			35.229	16,67
3. Penyusutan	Rp			100.000				100.000	
4. Total Biaya				269.345				331.373	
5. Penerimaan Kotor	Rp			400.000				600.000	
6. Keuntungan				130.655				288.627	
7. RCR				1,48				1,81	

Sumber : Data Primer, diolah

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Pompa Air

Pada usahatani padi sawah irigasi, penggunaan pompa air relatif sangat sedikit, umumnya digunakan pada musim tanam padi ketiga (MT III) dan awal musim tanam padi pertama (MT I) pada kegiatan pengolahan lahan. Selain untuk usahatani padi, penggunaan pompa air juga dilakukan pada usahatani lainnya, terutama usahatani jagung dan kacang tanah. Penggunaan pompa pada umumnya banyak dilakukan petani di daerah irigasi sedang dan tadah hujan. Tidak seperti halnya dengan traktor, pompa air pada umumnya hanya dimiliki oleh beberapa petani atau kelompok tani tertentu saja. Selain digunakan untuk keperluan sendiri atau kelompok, juga disewakan ke petani yang membutuhkannya. Dengan tenaga penggerak 18 PK, pompa air mampu mengairi sekitar 0,33 hektar per hari dengan jam kerja sekitar 10 jam.

Sistem pembayaran untuk jasa pompa air adalah sistem bagi hasil dari hasil kotor. Untuk komoditas padi jika solarnya ditanggung oleh pemilik pompa pembagiannya adalah 15 persen untuk jasa pompa dan 85 persen untuk petani, sementara untuk palawija 10 persen untuk jasa pompa dan 90 persen untuk petani. Jika solarnya ditanggung petani, pada

komoditas padi pembagiannya akan mengalami perubahan menjadi 10 persen untuk jasa pompa dan 90 persen untuk petani, sementara pada komoditas palawija berubah menjadi 5 persen untuk jasa pompa dan 95 persen untuk petani. Sementara besarnya biaya untuk operator baik untuk komoditas padi maupun palawija 30 persen dari keuntungan. Konsep keuntungan yang disepakati antara pemilik pompa dan operator adalah besarnya selisih antara penerimaan jasa pompa dengan biaya solar dan oli. Komposisi pembagian untuk jasa pompa dan petani atau komposisi untuk upah operator pada semua komoditas tidak mengalami perubahan setelah kenaikan harga BBM.

Sebelum adanya kenaikan harga BBM, untuk mengairi lahan seluas satu hektar rata-rata biaya operasional yang dibutuhkan pada usaha jasa pompa sekitar Rp 323 ribu dan setelah adanya kenaikan harga BBM menjadi Rp 356 ribu atau mengalami peningkatan sekitar 10,03 persen (Tabel 2). Hal yang cukup menarik bahwa walaupun tidak adanya perubahan komposisi dalam pembagian upah jasa pompa dan upah operator, ternyata keuntungan yang diperoleh pemilik pompa setelah adanya kenaikan harga BBM relatif lebih baik atau meningkat sebesar 8,73 persen dari Rp 609 ribu/ha menjadi Rp 663 ribu/ha. Tidak adanya perubahan dalam komposisi pembagian maka keuntungan yang diperoleh pemilik pompa lebih tinggi akibat adanya tambahan penerimaan dengan meningkatnya harga gabah. Selain itu, tidak berubahnya komposisi pembagian menunjukkan bahwa meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM seolah-olah tidak dibebankan kepada petani. Pemilik pompa tidak mengubah komposisi pembagian tersebut karena pemilik pompa sudah memprediksi akan terjadi kenaikan harga komoditas pertanian, dan bahkan mereka berpikir tambahan penerimaan akibat kenaikan harga tersebut lebih tinggi dari kenaikan biaya operasional karena kenaikan harga BBM. Jika mereka memprediksi tidak terjadi perubahan harga komoditas pertanian, dapat diduga mereka akan merubah komposisi tersebut, atau jika upah pompa air yang berlaku dalam bentuk uang (bukan bagi hasil) dapat dipastikan mereka juga akan menaikkan sewa pompa. Sehingga kalau dicermati secara mendalam dampak kenaikan harga BBM sebenarnya dibebankan kepada petani oleh usaha jasa pompa lewat harga komoditas padi yang semakin membaik.

Tabel 2. Perubahan Profitabilitas per Hektar Usaha Jasa Pompa Air di Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM 2005

Uraian	Satuan	Vol.	Sebelum			Sesudah Kenaikan BBM		
			Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis								
Harga Beli				2.500.000			2.500.000	
Tenaga Mesin	PK			18			18	
Umur Ekonomis	Tahun			5			5	
Kemampuan Kerja								
- Jam Operasi	Jam/hari			10			10	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			0.33			0.33	
2. Biaya Operasional				323.497	100,00		355.929	100,00
Solar	Liter	18,65	1.815	33.846	10,46	2.100	39.161	11,00
Oli	Liter	0,45	9.900	4.431	1,37	12.100	5.415	1,52
Perawatan	Rp			13.846	4,28		16.154	4,54
Upah Operator	Rp			271.374	83,89		295.199	82,94
3. Penyusutan	Rp			10.000			10.000	
4. Total Biaya	Rp			333.497			365.929	
5. Penerimaan Kotor	Rp			942.857			1.028.571	
6. Laba Bersih	Rp			609.360			662.643	
7. RCR				2,83			2,81	

Sumber : Data Primer, diolah.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Power Thresher

Penggunaan thresher khususnya untuk merontok padi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan varietas unggul baru berumur pendek dan mudah dirontok. Terdapat variasi kegiatan dalam penggunaan thresher di Sulawesi Tenggara. Di beberapa lokasi, penggunaan thresher menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen dan di beberapa lokasi lainnya penggunaan thresher tidak menyatu dengan tenaga panen. Dengan tenaga penggerak mesin 6,5 PK, kecepatan merontok padi rata-rata 6 jam per hektar. Dalam setahun luasan tanaman padi yang bisa dirontok berkisar 40 – 60 hektar.

Terjadi perubahan ongkos jasa sewa thresher yaitu dari 6,7% dari hasil produksi sebelum kenaikan harga BBM (dari 15 karung, 14 karung untuk pemilik dan 1 karung untuk jasa thresher) menjadi 8,3% setelah kenaikan harga BBM (dari 12 karung, 11 karung untuk pemilik dan 1 karung untuk jasa thresher). Perubahan juga terjadi dalam pembagian antara tenaga penyabit dan jasa thresher yaitu sebelum kenaikan harga BBM dari 6,7 persen tersebut, 25 persen untuk jasa thresher dan 75 persen tenaga penyabit dan setelah kenaikan harga BBM dari 9,1% tersebut sebanyak 30 persen untuk jasa thresher dan 70 persen untuk tenaga penyabit. Ongkos operator yang harus dibayar pemilik power thresher juga berubah dari Rp

15000/orang/hari menjadi Rp 20000/orang/hari. Jumlah operator berkisar 8 orang. Selain sebagai operator, mereka juga sekaligus berperan sebagai tenaga penyabit, sehingga penerimaan mereka setelah adanya kenaikan harga BBM sekitar Rp 20000/hari lebih tinggi dari tenaga penyabit.

Perubahan kinerja usaha jasa power thresher dengan adanya kenaikan harga BBM disajikan pada Tabel 3. Setelah kenaikan harga BBM, biaya operasional (termasuk biaya tenaga sabit) usaha jasa power thresher meningkat sebesar 9,31 persen dari Rp 793 ribu/ha menjadi Rp 867 ribu/ha. Namun demikian, dengan membaiknya harga komoditas padi dan adanya perubahan komposisi pembagian untuk tenaga penyabit menyebabkan penerimaan dan keuntungan usaha jasa ini meningkat masing-masing Rp 9,09 persen (Rp 943 ribu/ha menjadi Rp 1028 ribu/ha) dan 8,85 persen (Rp 134 ribu/ha menjadi Rp 146 ribu/ha). Fenomena di atas juga menunjukkan kalau dicermati secara mendalam bahwa kenaikan harga BBM selain dibebankan ke tenaga penyabit (dengan berubahnya komposisi pembagian) juga secara tidak langsung dibebankan ke petani lewat kenaikan harga gabah (walaupun komposisi pembagian tidak berubah).

Tabel 3. Perubahan Profitabilitas per Hektar Usaha Jasa Power Thresher di Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM 2005.

Uraian	Satuan	Vol.	Sebelum			Sesudah Kenaikan BBM		
			Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
1. Spesifikasi Teknis								
Harga Beli				4.700.000			4.700.000	
Tenaga Mesin	PK			6,5			6,5	
Umur Ekonomis	Tahun			5			5	
Kemampuan Kerja								
- Jam Operasi	Jam/hari			5			5	
- Luas Pelayanan	Ha/hari			1,30			1,30	
2. Biaya Operasional				792.849	100,00		866.675	100,00
Solar	Liter	6,25	1.815	11.344	1,43	2,310	14.438	1,67
Oli	Liter	0,23	9.900	2.228	0,28	12,100	2.723	0,31
Perawatan	Rp			25.000	3,15		26.667	3,08
Upah Operator	Rp			754.277	95,14		822.848	94,94
3. Penyusutan	Rp			15.667			15.667	
4. Total Biaya	Rp			808.515			882.341	
5. Penerimaan	Rp			942.847			1.028.560	
6. Keuntungan	Rp			134.331			146.219	
7. RCR				1,17			1,17	

Sumber : Data Primer, diolah.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usaha Penggilingan Padi (RMU)

Selain berpengaruh pada kegiatan produksi padi, kenaikan harga BBM juga mempengaruhi kinerja usaha penggilingan padi (RMU) di Sulawesi Tenggara. Kondisi yang sama juga dialami pada umumnya oleh RMU di wilayah lainnya. Kenaikan harga BBM telah merubah pembayaran ongkos giling dalam bentuk natura, yaitu sebelum kenaikan harga berlaku dari 11 kg beras yang dihasilkan dari penggilingan dipotong 1 kg untuk jasa penggilingan atau 90,9 persen untuk pemilik beras dan 9,1 persen untuk jasa RMU, sementara setelah kenaikan harga BBM dari 10 kg beras yang dihasilkan dari penggilingan dipotong 1 kg untuk jasa penggilingan atau 90,0 persen untuk pemilik beras dan 10,0 persen untuk jasa RMU. Dalam proses penggilingan dari 100 kg GKG biasanya dihasilkan 63-64 kg beras, 10 kg dedak/bekatul, 2 kg menir dan sisanya sekam. Bekatul/dedak dan menir pada umumnya diambil pemilik beras (petani). Harga dedak di Sultra berkisar Rp 600-700/kg.

Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan usaha jasa RMU meningkat sekitar 16,03 persen dari Rp 35/kg GKG menjadi Rp 40,6/kg GKG (Tabel 4). Sementara itu, setelah kenaikan harga BBM dengan berubahnya sewa penggilingan dan membaiknya harga beras menyebabkan penerimaan dan keuntungan yang diperoleh usaha jasa ini meningkat masing-masing 65 persen (Rp 108/kg GKG menjadi Rp 178/kg GKG) dan 88,5 persen (Rp 72,98/kg GKG menjadi 137,57/kg GKG). Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM sepenuhnya dibebankan ke pengguna jasa RMU (petani) baik melalui perbaikan harga beras maupun melalui perubahan komposisi sewa.

Tabel 4. Perubahan Profitabilitas Usaha Penggilingan Padi per Kuintal Gabah di Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM

Uraian	Satuan	Sebelum				Sesudah Kenaikan BBM			
		Volume	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)	Volume	Harga	Nilai (Rp)	Share (%)
A. Biaya				3.502	100,00			4.063	100,00
1. Solar	Lt	0,333	1.815	605	10,50	0,333	2.310	770	11,15
2. Oli	Lt	0,028	10.000	278	5,30	0,028	12.000	333	5,31
3. Perawatan				1.389	26,52			1.667	26,55
4. Upah Operator				987	53,04			1.050	53,11
5. Penyusutan				243	4,64			243	3,87
B. Penerimaan	kg beras	4,50	2.400	10.800		4,95	3.600	17.820	
Keuntungan				7298				13.757	
RCR				3,08				4,39	

Sumber : Data Primer, diolah.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani Padi

Dampak kenaikan harga BBM pada faktor-faktor produksi usahatani padi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya produksi (Tabel 5). Biaya traktor meningkat sebesar 50 persen (Rp 400 ribu per ha menjadi Rp 600 ribu per ha). Pada waktu yang bersamaan upah tanam juga mengalami peningkatan sekitar 40.0% dari Rp 250 ribu per ha menjadi Rp 350 ribu per ha. Demikian juga harga dan biaya input lainnya seperti obat-obatan, pupuk dan benih meningkat dengan kisaran yang bervariasi. Di sisi lain juga terjadi

Tabel 5. Perubahan Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani Padi per Hektar di Sulawesi Tenggara Saat Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

Uraian	Satuan	Sebelum Kenaikan BBM			Sesudah Kenaikan BBM		
		Volume	Harga	Nilai (Rp)	Volume	Harga	Nilai (Rp)
A. Biaya				3358025			3914250
1. Benih	kg	50	3000	150000	50	3500	175000
2. Pupuk							
a. Urea	kg	250	1150	287500	250	1200	300000
b. SP-36	kg	100	1500	150000	100	1650	165000
c. ZA	kg	100	970	97000	100	1050	105000
3. Pestisida/Obat-obatan							
a. Insektisida Cair	Lt	1.2	62000	74400	1.2	70000	84000
b. Fungisida Cair	Lt	0.8	90000	72000	0.8	95000	76000
c. Herbisida Cair	Lt	0.5	48000	24000	0.5	53000	26500
4. T. Kerja/Traktor							
a. Persiapan Lahan	HOK	4	15000	60000	4	20000	80000
b. Traktor				400000			600000
c. Tanam	HOK			250000			350000
d. Pemupukan	HOK	4	15000	60000	4	20000	80000
e. Penyemprotan	HOK	4	15000	60000	4	20000	80000
f. Penyiangan	HOK	15	15000	225000	15	20000	250000
g. Panen							
1. Menyabit	HOK	20	15000	300000	20	20000	350000
2. Power Thresher		892.5	1250	1115625	892.5	1300	1160250
5. Biaya Lainnya							
a. Pengairan				15000			15000
b. Pajak				17500			17500
B. Penerimaan	Kg	4503	1100	4953300	4503	1350	6079050
Keuntungan				1595275			2164800
RCR				1.48			1.55

Sumber : Data Primer, diolah.

kenaikan harga jual gabah di tingkat petani dari Rp 1100/kg GKP pada MT I menjadi Rp 1350/kg GKP pada MT II. Walaupun harga gabah yang diterima petani meningkat 22,75 persen namun kenaikan tersebut hanya sebesar 78 persen dari HPP yang ditentukan pemerintah saat ini, yaitu Rp 1730/kg GKP. Dengan demikian kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan efektif dalam mendongkrak harga di tingkat petani karena HPP relatif masih lebih tinggi daripada harga aktual di tingkat petani.

Dengan meningkatnya harga jual gabah, maka pendapatan yang diterima petani mengalami kenaikan 35,7 persen, yaitu dari Rp 1,60 juta/ha menjadi Rp 2,16 juta/ha. Hal ini menggambarkan bahwa dengan kenaikan harga BBM pendapatan yang diterima petani juga mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut secara tidak signifikan karena kenaikan biaya produksi lebih banyak dibebankan ke petani, sebaliknya usaha input produksi dan RMU justru kinerjanya sedikit lebih baik dibanding sebelum kenaikan harga BBM. Ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa posisi petani, baik sebagai pengguna input produksi maupun sebagai produsen padi cukup lemah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Kebijakan penghapusan subsidi BBM secara berulang-ulang pada tahun 2005 (Maret dan Oktober) yang ditandai dengan melambungnya harga BBM secara tajam berdampak terhadap perubahan kinerja pada semua aspek ekonomi, termasuk sektor pertanian.
2. Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak BBM ternyata sedikit membawa perbaikan pada kinerja usaha jasa input produksi (traktor, pompa air, power trresher) dan usaha penggilingan padi (RMU), sebaliknya menyebabkan menurunnya kinerja berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM yang dialami oleh masing-masing usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani dengan cara menaikkan sewa jasa alsintan. Tidak hanya tambahan kenaikan biaya produksi yang sepenuhnya dibebankan ke petani, malahan juga sebenarnya usaha alsintan telah mengambil bagian pendapatan petani dengan menaikkan sewa yang terlalu tinggi dari sekedar untuk mempertahankan keuntungan yang sama.

Implikasi Kebijakan

Oleh karena itu untuk mempertahankan keuntungan relatif yang diterima petani, dan mempertahankan kebijakan HPP yang dibuat pemerintah efektif sampai ke petani maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah di dalam penyesuaian kenaikan tarif jasa sewa alsintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermoredjo, S.K., 2003. Analisis Kebijakan Hubungan Antarsektor Perekonomian Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 1(4):345-362.
- Friyatno S., Handewi P.S., B. Rachman dan Supriyati. 2004. Kelembagaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah.
- Rachman, B., H. Malian, Sri Hery dan K. Kariyasa, 2001. Dinamika dan Prospek Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian. Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Simatupang P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005. Evaluasi Pelaksanaan dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaian Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) Volume 3 Nomor 3, September 2005.